



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu merupakan sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang di tangani oleh pemerintah. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak, demikian juga dengan keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan, apabila ada suatu penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan, seperti halnya seminar, lokakarya, dialog, penyuluhan, dan sebagainya.

Kondisi ini sangat jauh berbeda dibandingkan dengan sebelum dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1984. Saat itu pajak bukan dianggap sebagai kewajiban negara, melainkan lebih dianggap sebagai beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang atau sebuah entitas bisnis. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pajak, yang indikasinya terlihat dari masih sedikitnya jumlah wajib pajak, maupun rendahnya jumlah realisasi penerimaan pajak pertahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat satu diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Pajak Pertambahan nilai dapat dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi penyerahan barang dan jasa. Pertambahan nilai itu sendiri karena dipakainya faktor-faktor produksi setiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemungutannya dapat dilakukan sampai beberapa kali untuk sampai pada pemungutan terakhir, yaitu pada konsumen terakhir sebagai pemakai BKP tersebut.

Setiap PKP yang melakukan pemungutan PPN atas dasar penyerahan barang atau jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terutang pajak. Bentuk, ukuran, isian dan nomor serinya telah ditentukan oleh DJP yang berupa Faktur Pajak Standar. Begitu sangat pentingnya faktur pajak dalam mekanisme pengenaan PPN, sehingga bagi pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak diperkenankan membuat faktur pajak, bahkan sanksi yang cukup berat jika ketentuan ini dilanggar. Pengisian data faktur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak juga harus dilakukan dengan lengkap dan benar oleh PKP yang menerbitkan faktur pajak, karena kesalahan pengisian faktur juga akan dikenakan sanksi, dan bagi pembeli, jika faktur pajak tidak benar tersebut akan merupakan faktur pajak cacat yang tidak dapat dikreditkan.

Sebagai perwujudan dari *self assessment system*, perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Dengan menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perlu diadakan analisa perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perusahaan yang akan dijadikan topik penulisan adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak industri. Penulis ingin mengetahui bagaimana aspek Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada perusahaan dagang.

PT. Riau Andalan Nusantara merupakan sebuah perusahaan yang bergerak sebagai agen/distributor dan transporter BBM industri pelumas Pertamina yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PT. Riau Andalan Nusantara sebagai agen/distributor Bahan Bakar Minyak (BBM) industri bekerjasama dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Elnusa Petrofin (anak perusahaan dari Pertamina) dalam memenuhi kebutuhan BBM untuk industri-industri yang ada di wilayah Riau dan sekitarnya. PT. Pertamina (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan BBM ke seluruh pelosok daerah yang ada di Indonesia termasuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau. Sedangkan PT. Elnusa Petrofin adalah anak perusahaan dari PT. Pertamina yang melakukan usaha dibidang persediaan, pemasaran, penyimpanan dan distribusi khususnya untuk produk/jasa Minyak dan Gas di Indonesia. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Perusahaan akan mencatat, memperhitungkan dan melaporkan penyerahan PPN tersebut dalam SPT Masa PPN. Pajak Masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah di pungut.Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa tahun Pajak berikutnya.

Dari hasil kegiatannya, perusahaan telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2016 terdapat beberapa kesalahan yaitu:

1. Atas pemungutan PPN Keluaran, PT. Malindo Feedmill melakukan transaksi pada tanggal 15 Februari 2016 secara kredit sebesar Rp 29.250.000, pada saat penerimaan uang muka senilai Rp.10.000.000 dari PT. Malindo Feedmill tbk, PT. Riau Andalan Nusantara tidak mengakui PPN yang terutang karena PT. Malindo Feedmill hanya membayar sebagai uang muka tidak termasuk pajak, sehingga PT. Riau Andalan Nusantara belum menerbitkan Faktur Pajak. Dalam pencatatan, PT. Riau Andalan Nusantara mendebet kas dan mengkreditkan penerimaan uang muka. Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perpajakan sebagaimana penegasan dalam pasal 11 ayat (2) yaitu dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Atas kesalahan ini, perusahaan telah melanggar peraturan perpajakan, yaitu ketika ada penerimaan uang muka dari pembeli, perusahaan tidak mengeluarkan Faktur Pajak dan tidak mengakui PPN yang terutang sehingga dapat merugikan negara dari sektor Pajak.

2. Kesalahan membuat Faktur Pajak Standar yang cacat atau tidak lengkap yang disebabkan oleh tidak adanya cap dan tanda tangan, tidak memberikan alamat lengkap dan NPWP perusahaan pada Faktur Pajak tanggal 25 Oktober 2016 dan pada tanggal 29 Oktober 2016. Dengan hal ini tidak sesuai dengan peraturan Perpajakan menurut ketentuan dalam pasal pasal 13 ayat (5) UU PPN pasal 6 ayat (2) per DJP No. 24/PJ/2012 tentang tata cara pengisian Faktur Pajak, bahwa Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, benar dan jelas dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk serta mencantumkan keterangan tentang penyerahan dan pembelian BKP/JKP. Dalam hal ini terdapat kecacatan membuat Faktur Pajak Standar yaitu : PT. Riau Andalan Nusantara sebagai pembeli barang kena pajak (BKP) yang diterbitkan oleh PT. Bina Buana Mandiri sebagai penjual BKP. Akibat dari Faktur Pajak yang cacat (tidak lengkap) ini PT. Riau Andalan Nusantara tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (8) yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima BKP maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. Bagi si penjual yang menerbitkan Faktur Pajak cacat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 14 ayat 4)

3. Pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Riau Andalan Nusantara belum sesuai dengan peraturan Perpajakan, karena masih adanya kesalahan yang dilakukan dalam pengisian SPT Masa PPN karena kecacatan atau ketidaklengkapan Faktur Pajak sehingga dalam hal tersebut berdasarkan pasal 9 ayat (8) UU PPN maka PPN yang tercantum faktur pajak cacat (tidak lengkap) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, sementara Pengusaha Kena Pajak penjual akan dikenakan sanksi 2% dari Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (4) UU KUP. Dalam hal ini PT. Riau Andalan Nusantara tidak meminta pembetulan Faktur Pajak yang cacat atau tidak lengkap kepada perusahaan yang menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP/JKP sehingga berpengaruh terhadap terjadinya kesalahan dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Prosedur pengisian SPT Masa PPN memiliki prosedur sendiri, dengan cara menghitung PPN nya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, setiap PKP menjual/membeli BKP harus membuat Faktur Pajak setiap jual beli. Prosedur pengisian Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, dan tidak boleh mengisi

sebagian data. Bahkan dalam pengisian SPT Masa PPN juga harus diisi dengan lengkap dan benar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu diadakan penelitian yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Riau Andalan Nusantara dengan judul: **“PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN PADA PT. RIAU ANDALAN NUSANTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Riau Andalan Nusantara telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009?
2. Faktor apakah yang menyebabkan adanya kesalahan Perpajakan pada PT. Riau Andalan Nusantara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Riau Andalan Nusantara telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui Faktor apakah yang menyebabkan adanya kesalahan Perpajakan pada PT. Riau Andalan Nusantara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini juga bermanfaat atau berguna untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi penulis, untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan atau untuk menambah wawasan penulis dengan melihat praktek di perusahaan dalam tata cara perhitungan Pajak Pertambahan nilai, sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan dibandingkan dengan kenyataan praktek yang ada.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan informasi tambahan dan dapat dijadikan masukan dalam usaha perbaikan kinerja perusahaan dalam menjalankan dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan datang.
3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan kajian bagi peneliti lanjutan yang ingin meneliti hal-hal yang sama dikemudian hari dan dapat lebih memahami tentang bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri menurut Undang-undang yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang direncanakan akan di buat pada skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan teori yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan objek penelitian yaitu PT. Riau Andalan Nusantara. Disini akan dibahas mengenai sejarah perusahaan, struktur organisasi, serta bidang kegiatan yang berhubungan dengan PPN Masukan dan PPN Keluaran

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai khususnya PPN Masukan dan PPN Keluaran pada PT. Riau Andalan Nusantara sehubungan dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta penerapannya pada perusahaan tersebut.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan atas analisa permasalahan, serta memberikan saran-saran yang diberikan dari penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang terjadi seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya.